



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/9283>

ANALISIS KERJASAMA BILATERAL SOSIAL POLITIK CHINA DAN INDONESIA DALAM MASA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO 2014 - 2020

Anisya Munatama¹, Kiki Zhaidah²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: anisya.munatama193007@students.unila.ac.id

Sejarah Artikel diterima Februari 2023, disetujui: Maret 2023, dipublikasikan: April 2023

Abstrak

Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki wilayah yang luas diikuti dengan banyak sekali keunggulan di dalamnya mulai dari kelautannya sampai pada kehidupan masyarakat. Keunggulan Indonesia ini yang menjadi daya tarik negara lain untuk mengenal dan masuk ke dalam wilayah dengan menjalin suatu hubungan yang baik salah satunya China. Kedua negara ini sepakat untuk meningkatkan hubungan baik dalam bidang ekonomi, sosial hingga politik. Terjalannya kerjasama antara China dan Indonesia telah terjalin sangat lama. Indonesia dengan keunggulannya dan China dengan keunggulannya yang menjadikan kedua negara ini saling berkomitmen dalam membantu dan memajukan guna peningkatan pembangunan dari berbagai sektor. Kerjasama ini menunjukkan kedua negara saling membutuhkan dalam keperluan kepentingan nasional masing-masing. Disini akan membahas mengenai hubungan bilateral antara kedua negara yaitu Indonesia dan China pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Selama kepemimpinan Joko Widodo, telah melakukan beberapa kerja sama dengan China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis hasil proses dan perkembangan kerjasama Indonesia dan China menjadi fokus analisis untuk mencari kerjasama bilateral yang terjadi dalam sosial politik era kepemimpinan Joko Widodo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menjabarkan data dan memberikan analisis dengan deskriptif secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo hubungan kerjasama bilateral politik, ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dan China telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, membuat hubungan kedua negara ini menjadi kuat. Kerjasama bilateral ini menjadikan negara Indonesia cukup kuat dan Indonesia sendiri disukai oleh China. Maka dari itu, China gencar melakukan kerjasama bilateral di dalam sosial politiknya.

Kata Kunci: China-Indonesia, Joko Widodo, Kerjasama Bilateral

Abstract

As a large country, Indonesia has a vast territory followed by a lot of advantages in it, starting from its maritime affairs to people's lives. Indonesia's superiority is what attracts other countries to get to know and enter the region by establishing a good relationship, one of which is China. The two countries agreed to enhance good relations in the economic, social, and political fields. The cooperation between China and Indonesia has existed for a very long time. Indonesia with its advantages and China with its advantages have made these two countries committed to each other in helping and advancing to increase the development of various sectors. This cooperation shows that the two countries need each other in the interests of their respective national interests. Here, we will discuss bilateral relations between the two countries, namely Indonesia and China during the leadership of President Joko Widodo. During Joko Widodo's leadership, he has carried out several collaborations with China. The problem in this study is to analyze the results of the process and the development of cooperation between Indonesia and China to become the focus of analysis to seek bilateral cooperation that occurred in the socio-political era of Joko Widodo's leadership. The method used in this study is descriptive qualitative, namely describing the data and providing analysis with a deductive, descriptive method. The results of this study show that during Joko Widodo's leadership, political, economic, social, and cultural bilateral cooperation relations between Indonesia and China have developed very rapidly in recent years. This makes the relationship between the two countries strong. This bilateral cooperation has made the Indonesian state strong enough and Indonesia itself is favored by China. Therefore, China is intensively conducting bilateral cooperation in its social politics.

Keywords: China-Indonesia, Joko Widodo, Bilateral Cooperation

PENDAHULUAN

Kerjasama adalah rangkaian hubungan yang mapan dan sah dalam Hukum, misalnya dalam organisasi atau lembaga internasional. Kolaborasi terjadi karena perubahan perilaku menurut aktor dalam reaksi dan antisipasi opsi yang diterapkan aktor lain. Kolaborasi dapat dilakukan melalui proses negosiasi. Kerjasama bisa juga muncul dari komitmen pribadi untuk kesejahteraan umum atau usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Bagian penting dari perilaku kooperatif adalah aktif, sejauh mana semua orang percaya bahwa pihak lain itu mitra yang menguntungkan. Teori kerjasama adalah realisasi kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan kerjasama, seperti untuk mencoba memenuhi kepentingan mereka sendiri bereksperimen sendiri atau bersama untuk bersaing (Putri, 2019).

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain dimulai setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa lembaga, baik bilateral, Indonesia merencanakan kerjasama baik regional maupun multilateral untuk menggunakan negara-negara tersebut sebagai sahabat untuk membangun hubungan baik. Dalam menentukan korelasi ini Indonesia selalu mengedepankan pemajuan kehidupan masyarakat, nilai-nilai saling menghormati, mencampuri urusan negara lain, menyerahkan Pelaksanaan kekuasaan dan konsultasi dan prioritas persetujuan dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia saat ini bekerja secara bilateral dengan 162 negara daerah

tertentu yang bukan merupakan daerah berpemerintahan sendiri (Candra, 2022).

Ada alasan mengapa banyak negara telah bekerja sama dengan Indonesia. Setiap negara harus bekerja sama secara bilateral untuk menjaga perdamaian dunia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi orang lain, bekerja sama dengan imigrasi, mengatasi masalah global bersama dan mencapai kemajuan budaya. Kerjasama Bilateral dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang turut menyebabkan terjadinya hubungan tersebut Kerja sama bilateral:

- 1) Ketidakmampuan negara untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat karena keterbatasan sumber daya alam negaranya,
- 2) Ketidakmampuan negara untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat karena keterbatasan teknis dan juga karena kurangnya sumber daya manusia Kualitas.
- 3) Ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan konflik internalnya
- 4) Keinginan negara untuk berdamai dengan negara peserta hubungan bilateral.
- 5) Keinginan negara untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan Rakyat
- 6) Keinginan negara untuk mempercepat pembangunan negara.

Salah satu negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia yakni negara China. Diketahui sebagai "Negeri Tirai Bambu", China merupakan negara dengan posisi dengan keadaan ekonomi yang baik dan teknologi berkembang dengan lebih cepat dari negara lainnya, oleh karena itu China dianggap sebagai kekuatan besar di Asia dan reputasinya sebagai kekuatan besar

telah menyebar ke Amerika Serikat hingga Eropa (Amanda, 2021).

Hubungan yang terjalin antara Indonesia-China merupakan sejarah panjang, yakni adanya interaksi antara nenek moyang bangsa Indonesia dengan Tionghoa yang terjalin sejak abad sebelum masehi. berasal dari keterkaitan hubungan kedua negara telah terlihat sejak datangnya etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan Indonesia kuno yang memiliki keterkaitan dengan China, seperti kerajaan Sriwijaya, Airlangga, dan Majapahit. Munculnya kebaikan dari Cheng Ho kepada Indonesia pada abad-14 dipicu dengan hubungan simbolis dari keterlibatan antar negara (Zein, 2000).

Perjalanan sejarah yang panjang yang dilalui oleh Indonesia dan China dalam membentuk hubungan politik yang mulai diresmikan pada 9 Juni 1950. Namun seiring berjalanan waktu sampai pada akhirnya kedua hubungan dua negara ini bersitegang dalam hubungan diplomatiknya ditahun 1967 dan mencairnya perselisihan ini pada 3 Juli 1990 yang ditandai dengan oleh dua Menteri luar negeri di Beijing untuk menyetujui “*The Resumption of the Diplomatic Relations between the Two Countries*” (Sudjatmiko, 2012). Menguatnya hubungan Indonesia-China pada kepemimpinan Joko Widodo mulai menguat. Adanya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur yang nantinya dijadikan sebagai investasi besar ini membuat Indonesia melakukan Kerjasama kepada China (Andika, 2017).

Terpilihnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin RI ke-7 kemungkinan besar Akan membarui ciri dan gaya diplomasi Indonesia yg tidak sama dengan praktik diplomasi 10 tahun

terakhir dalam era Presiden SBY (Madu, 2014). Sejak menjadi presiden pada masa jabatan pertamanya dari tahun 2014 hingga 2018, Jokowi telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk merespon dan menyikapi isu-isu kewargaan publik yang menarik dari kepemimpinan sebelumnya (Hastangka, 2020).

Perencanaan atau program kerja lima tahun ke depan 2014-2019 harus segera ditambah dengan seruan Presiden Joko Widodo. Salah satunya mengenai kebijaksanaan maritim “sokoguru” politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, politik luar negeri harus didedikasikan dan berorientasi pada perwujudan kepentingan bersama, yaitu penciptaan dan perwujudan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan terpisah secara budaya. Kebijaksanaan terus dipraktikkan dengan didasarkan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif (Madu, 2014).

Perayaan 65 tahun menjadi simbol hubungan bilateral Indonesia dan China yang mula membaik. Untuk merayakannya, Presiden Joko Widodo berkunjung ke China Kembali pada 25-28 Maret 2015. Kunjungan ini juga diikuti dengan pembahasan kerjasama Indonesia-China dalam memperkuat hubungan keduanya (Andika, 2017).

Berdasarkan hal di atas terjalinnya kerjasama negara Indonesia dengan beberapa negara lainnya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi oleh negara itu sendiri sehingga diperlukan kerjasama bilateral yang salah satunya dilakukan oleh Indonesia dengan China dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bagi masing-masing negara, kerjasama bilateral Indonesia-China sudah terjalin sejak zaman nenek moyang dan masih

terjalin hingga saat ini yakni pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo, lalu bagaimanakah proses dan perkembangan kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan China baik dalam bidang sosial dan politik pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014-2020.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu penyajian informasi dan analisis deskriptif deduktif. Yang mana, menganalisis hasil kerjasama Indonesia dan China menjadi fokus analisis untuk mencari kerjasama bilateral yang terjadi dalam sosial politik era kepemimpinan Joko Widodo. Studi pustaka digunakan buat merogoh data dan pemahaman lebih berdasarkan penelitian terdahulu. Analisis ini didukung dengan data yang diambil dari buku, jurnal, dan website resmi pemerintah (Simanjutak, 2020). Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang mengarah pada proses yang ditujukan untuk membuat kabar kualitatif melalui penggambaran yang cermat. Penelitian kualitatif bukan menjelaskan pengukuran atau metode kuantitatif lainnya. olehnya, penelitian kualitatif hanya menggambarkan masalah yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berguna untuk menjelaskan gambaran keadaan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan relevan dengan lebih dari satu variabel penelitian atau permasalahan penelitian (Mulyadi, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Kerjasama Bilateral

Disampaikan oleh KJ Hosti, hubungan bilateral ini terbentuk karena adanya konflik dalam interaksi. Maka dari itu, konflik ini yang menyebabkan berlangsungnya hubungan serius yang bukan sekedar persaingan saja.

Konflik ini sering disebabkan oleh konflik dalam mencapai keinginan tertentu seperti ekspansi wilayah, keamanan, kemudahan akses ke wilayah perdagangan, prestise, aliansi, revolusi dunia, penggulingan pemerintah negara yang bermusuhan, perubahan prosedur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain-lain. Usaha guna menjaga atau mencapai tujuan, perintah, aktivitas, atau keduanya, yang akan bertentangan dengan kepentingan dan tujuan negara lain (Saputra, 2016).

Kerjasama bilateral adalah hubungan kerjasama antara 2 sisi, sehingga terdapat dua entitas yang bertindak sebagai Negara. Hal ini, dilihat dari adanya rasa kebergantungan satu negara dengan negara yang lainnya. Tanpa adanya suatu hubungan dari kedua negara akan membuat salah satu negara ini tidak dapat bertahan. Dikatakan oleh Kusumo Hamidjo, Kerjasama bilateral yaitu hubungan Kerjasama antar negara yang tidak dibatasi dari geografisnya, untuk mencapai tujuan dalam menciptakan perdamaian dunia dalam hal politik, ekonomi, sosial, hingga pada budayanya (Amalia, 2018).

Menurut Juwondo yang mengatakan bahwa kerjasama bilateral yang dipimpin oleh satu negara benar-benar fundamental sebab kerjasama bilateral adalah interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan

ditingkatkan dengan menghormati hak kedua nya untuk bekerja sama dalam segala bidang kehidupan sebagai negara-bangsa juga tidak mengabaikan dan mengisolasi keberadaan negara lain dan mewujudkan perdamaian dan nilai tambah yang mendukung hubungan bilateral. Kerja sama bilateral dapat mencakup banyak bidang, antara lain politik, ekonomi, budaya - masyarakat, pertahanan dan keamanan (Amalia, 2018). Kerjasama bilateral ini dilakukan di beberapa bidang seperti budaya, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Penyelesaian permasalahan yang terjadi pada kedua negara ini bisa dilakukan dengan melalui kerjasama bilateral. Adanya kepentingan dari tiap-tiap negara dapat dilakukan dengan beberapa jenis Kerjasama bilateral yang disesuaikan dengan keperluan tersebut. Dari Kerjasama bilateral ini sangat tidak dipungkiri memiliki posisi yang penting untuk meminta bantuan dari negara lain karena sejatinya negara tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Dorongan ini akhirnya membuat negara-negara terlibat dalam kerjasama internasional termasuk Kerjasama bilateral ini. Adanya kesamaan kepentingan dua negara menegaskan Kerjasama bilateral ini memiliki peran penting untuk menghindari konflik-konflik (Denimah, 2021).

Hubungan China Dan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral

Menurut Kustia (2001) berhubungan diplomasi antara Indonesia-China telah dimulai dari tahun 1950. Hubungan yang aktif sebab keadaan internal China Indonesia prihatin dengan prosesnya rekonstruksi dalam suasana revolusi. Hubungan diplomatik Indonesia dan China dibekukan pada oktober 1967.

Setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI China menjadi negara yang berperan dalam mendukung PKI saat itu. China sudah memulai upaya menjalin kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1985-1988. Adanya peran serta dukungan China terhadap PKI berakibat pada timbulnya keraguan politik Indonesia terhadap China dalam menormalkan hubungan tersebut. Pulihnya hubungan Indonesia-China ditandai dengan adanya kondisi terika, bersama, serta kunjungan perdana menteri China ke Indonesia pada tanggal 6-10 agustus 1990 dengan menandatangani kesepakatan tentang pemulihan hubungan diplomatik serta tanda tangan perjanjian kerjasama ekonomi dan bisnis (Huda, dan Zulihar, 2018).

Kedatangan China memberikan kekuatan penting untuk pembangunan strategis di wilayah Asia Timur dan sekitarnya, hal ini merupakan kekuatan pendorong adanya perubahan dalam dinamika hubungan kekuasaan serta pengaruh penting dalam politik asia timur. China merupakan negara yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek termasuk dalam keuangan, keamanan, militer, dan politik. Adanya kebijaksanaan pintu terbuka mampu membawa perekonomian pasar China ke arah yang lebih modern, kebijaksanaan ini mampu membawa China melalui perubahan besar yang terjadi dalam struktur perekonomian nasional (Rachmayanti, 2014).

Ketika masa kepemimpinan presiden Joko Widodo jaringan Indonesia-China berkembang cukup pesat. Sebenarnya pertumbuhan tersebut bagian dari indikasi kuat kebijakan luar negeri Indonesia pada China. Prioritas presiden Jokowi terhadap China telah terlihat dari awal mandatnya. Secara

simbol negara China merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh presiden Jokowi yakni pada 8 November 2014. Kunjungan yang dilakukan Jokowi bertepatan dengan dilaksanakannya KTT APEC di Beijing China. Membaiknya jaringan Indonesia-tingkok tercermin dalam peringatan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-China. Kemudian presiden Jokowi melakukan kunjungan kembali pada tanggal 25-28 maret 2015 guna membahas beberapa isu dalam rangka memperkuat kerjasama China-Indonesia. Dalam pembahasan tersebut para kepala negara memfokuskan pada bidang ekonomi khususnya perniagaan, infrastruktur, industri, keuangan, pariwisata, dan sosial, dari pertemuan ini di sepekat 8 nota kesepahaman (Andika, dan Aisyah, 2017)

Kesepakatan antara Indonesia dan China atas 36 nota kesepahaman dengan waktu yang sangat relatif singkat dengan menunjukkan keseriusan China dan Indonesia dalam mempererat hubungan. Hubungan Indonesia-China dipengaruhi oleh faktor internal yakni adanya kebutuhan pembangunan sarana prasarana dibawah kepemimpinan Jokowi. Indonesia mempunyai rancangan pembangun yang ambisius dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.700 Triliun (Bappenas, 2015). Pada kenyataannya pemerintah Indonesia tidak mampu dalam membiayai pambangunan infrastruktur tersebut, sehingga perlunya investasi asing. Adapun faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap sikap Indonesia kepada China yakni adanya kegagalan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan strategi Asianya. Amerika Serikat menjadi sangat terancam dengan keberadaan China yang telah mempunyai kekuatan serta adanya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh

China. Amerika Serikat memperkenalkan konsep "*Rebalancing to Asia*". Untuk menaikkan tingkat keamanan Kawasan serta kemakmuran ekonomi di Kawasan Indo-Asia-Pasifik ini merupakan tujuan dari terbentuknya konsep dari *Rebalance to Asia* oleh Amerika Serikat. Selanjutnya terbentuk aliansi Trans-Pacific Partnership (TPP) yang merupakan wujud untuk melakukan perubahan yang memulihkan dengan menciptakan kerjasama ekonomi bagi negara-negara terutama dalam Kawasan Asia-Pasifik. Maksud lain dari TPP berguna untuk mempererat ekonomi antar negara agar mendorong pertumbuhan dalam perdagangan. (Andika, dan Aisyah, 2017).

Dalam awal masa jabatan Presiden Jokowi pada 2015, lalu nilai perdagangan China dengan Indonesia menyusut menjadi USD 43,2 miliar dari hanya USD 8,7 pada tahun 2005 Satu miliar. Indonesia ingin meningkatkan investasi China di negara tersebut. Tirai Bambu kini menjadi negara ketiga terbesar investor asing setelah Singapura Jepang. Indonesia kini memiliki hubungan yang lebih dekat dengan China kecuali perjanjian untuk memperkuat kerja sama bilateral strategi komprehensif di tahun 2013. Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sepakat kerja sama di delapan bidang. Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) diselenggarakan di ruang publik besar pejabat Indonesia dan saksi China adalah Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping (Kalebos, 2020).

Mengidentifikasi peluang kerjasama berdasarkan saling menguntungkan dan timbal balik menguntungkan Pertemuan tingkat tinggi kehumasan di Indonesia dan Cina

dianggap sebagai Cina dan Indonesia secara bergantian. Bertemu di level tinggi dalam bidang hubungan antar masyarakat antara Indonesia dan Cina yang pertama kali terjadi di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2015 di Kantor Kementerian Kerjasama Pembangunan Orang dan Budaya (Kalebos, 2020).

Tahun 2017, Indonesia telah menjadi tuan rumah untuk pertemuan ketiga membahas perihal hubungan manusia yang dilakukan antara Indonesia dan China. Pertemuan ini memberikan kesempatan baik untuk memberikan harapan dalam kerjasamanya. Adanya pertemuan, kedua negara saling memberikan masukan dan memperkenalkan mengenai pengetahuan dan pemahaman. Ini dibentuk dengan adanya forum pertukaran informasi, mengenalkan tujuan dan strategi dalam bidang hubungan antar komunitas, mengangkat isu terkait pergerakan antar kedua negara tersebut, dan memberikan Kerjasama yang baik dalam kepemimpinan kedua negara. Sedangkan, dalam hubungan ekonomi kedua negara ini melakukan Kerjasama dengan menjadi mitra dan sumber bisnis, guna mendorong investasi China dalam proyek Percepatan dan Rencana Induk Perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), untuk menjadi negara maju begitupun sebaliknya (Tobing, 2021).

Bentuk Kerjasama Bilateral China Dan Indonesia

Kerjasama antara Indonesia dan China lebih merupakan kerja sama antara perusahaan-perusahaan milik negara. Jika dilihat lebih jauh, dalam hal ini China memang telah merebut hati Indonesia dan perlahan mencoba menembus lebih dalam ke lapisan vital Indonesia, dimana

lapisan ini merupakan sektor terpenting yang perlu banyak pembenahan dan bantuan eksternal untuk kekuasaan (Tobing, 2021).

Beberapa tahun terakhir hubungan bilateral politik, ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dan China telah terjalin dengan erat. Hal ini ditandai dengan peningkatan pertemuan antara kepala negara dan pemerintahan negara-negara tersebut. Menjabatnya Presiden Jokowi sebagai pada Oktober 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia, ia melakukan pertemuan sebanyak empat kali dengan Presiden Xi Jinping bersama pejabat senior lainnya. Sekitar kurang lebih 60 perjanjian Kerjasama Indonesia dan China selama empat tahun terakhir dan kurang lebih 20 perjanjian kerjasama untuk membahas hubungan masyarakat. Kegiatan pemberian beasiswa kepada para pelajar, Indonesia dan China telah melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan. Kerjasama ini juga membahas mengenai standarisasi dalam penyelenggaraan ujian Bahasa mandarin (HSK) yang berada di Indonesia. Dari kerjasama yang telah dilakukan telah mengalami peningkatan yang pesat dalam Pendidikan pada tahun 2016. Gagasan ini terbentuk oleh Beijing Foreign Studies University dengan adanya Aliansi Think-Tank China Indonesia, beranggotakan dari China yang terdiri dari beberapa universitas bersama dengan Indonesia dengan anggota dari beberapa universitas. Hal ini dilakukan agar menjadi sarana dalam kerjasama dan pertukaran informasi untuk perguruan tinggi di Indonesia dan China (Ansori, 2017).

Semakin banyak orang China yang datang ke Indonesia, oleh karena itu bahasa asing yaitu bahasa Mandarin dibutuhkan oleh orang Indonesia selain

bahasa Inggris. Keterampilan bahasa Mandarin asli ini digunakan sebagai sarana komunikasi langsung dengan orang Cina yang berbicara sedikit bahasa Inggris. Apalagi di kawasan komersial yang banyak orang China termasuk atasannya (Amanda, 2021).

Masyarakat lokal yang mempelajari bahasan mandari terbantu dengan Lembaga CI. Lembaga CI yang merupakan Lembaga pembelajaran Bahasa Mandarin yang langsung dibantu dengan pengajar langsung dari China. Kegiatan belajar Bahasa mandari ini mempunyai pengaruh dalam masyarakat karena di Indonesia cukup banyak orang dengan keturunan Tionghoa. Akan tetapi, bukan hanya China yang membantu dalam pembelajaran Bahan Mandari namun pihak Indonesia juga membantu untuk negara China. Dengan artian bahwa kedua negara ini saling melengkapi dengan adanya kerjasama ini. Pengajar Bahasa Mandari melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran baik dari kurikulum, metode hingga pada pembentukan guru-guru (Amanda, 2021).

Fokus presiden Joko Widodo telah terlihat dengan China pada awal kepemimpinannya. Ini merupakan isyarat kuat terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dengan China. Semakin lama terjalin hubungan yang kuat dan berkembang bagi kedua negara ini (Andika, 2017).

Sangat sulit bagi Indonesia untuk menghindari fakta bahwa Laut China Selatan memiliki kepentingan besar dan strategis. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus melakukan perubahan dengan perluasan pertahanan, ekonomi dan budaya. Terutama dalam hal memadamkan konflik wilayah Laut China Selatan yang telah berdampak pada situasi di area kawasan tersebut. Presiden

Joko Widodo memegang teguh untuk menjadikan Indonesia sebagai “penengah yang jujur” dalam upaya melakukan perdamaian baik itu dalam keamanan hingga konflik. Indonesia juga memilih untuk tidak ikut campur dalam hal yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Maka dengan itu, Presiden Joko Widodo meminta untuk militer Indonesia Kembali ditingkatkan menjadi lebih baik (Saragih, 2018).

Dilihat dari kepemimpinan presiden Joko Widodo terlihat dari keseriusan untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia di wilayah natuna yang telah memberikan amanat ini. Terdapat tindakan-tindakan cepat untuk mengamankan kawasan perbatasan tersebut dari pihak China. Perlakuan yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo dapat dikatakan tidaklah main-main (Umar, 2020).

Organisasi ASEAN dan China merupakan pendekatan regional yang dilakukan oleh Indonesia dengan China. Terkait dengan mengenai konflik Laut China Selatan Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan kebijakan hukum dan diplomasi, dan lintas sektor. Melalui kedua cara tersebut, inti yang dimaksud bertujuan agar Indonesia ikut dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Laut China Selatan. Dengan diplomasi yang menjadi tujuan dalam memelihara kestabilan dari keamanan regional diikuti oleh China dan Negara di ASEAN untuk tidak bertindak yang akan menimbulkan ketegangan militer. Indonesia menerapkan kebijakan hukum dan diplomasi dalam pemecahan masalah Laut China Selatan dengan konteks berdasarkan Prinsip-Prinsip PBB (Umar, 2020).

Belt and Road Initiative (BRI) atau *Belt and Road Initiative* (BRI) telah

dilakukan implementasi oleh Presiden China Xi Jinping. Tujuan adanya program ini guna untuk negara maju dan negara berkembang mendapatkan konektivitas global. Adanya perdagangan bebas yang lebih efektif dan baik dalam pasar internasional maka BRI telah difokuskan untuk kegiatan tersebut. Terdapat dua jalur yang dimiliki oleh BRI yaitu Jalur sutera darat (*Silk Road Economic Belt*) dan Jalur sutera maritim (*Maritime Silk Road*). Telah lebih dari 65 negara yang dihubungkan oleh BRI bahkan lebih dari 62% populasi, dengan 35% perdagangan dunia dan 31% PDB dunia (Putri, 2019).

Terbukanya jalur sutera BRI menjadikan hubungan kedua belah negara Indonesia dan China semakin erat. Terbukti pada hubungan bilateral terjadi peningkatan dalam Kerjasama. Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat sehingga tidak ada perbedaan ekonomi baik itu kota maupun desa. Presiden Joko Widodo juga melakukan pemerataan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh pemerintah atau kurang mendapat perhatian. Selain itu, dalam politik Indonesia dan China tetap menjaga hubungan Kerjasama ini. China patut mempertimbangkan Indonesia sebagai pemasok bahan untuk dijadikan sumber daya yang besar yang juga dilihat dari geopolitik dan geostrategisnya. Namun, disisi lain Indonesia menjaga dirinya dari China untuk tidak terlibat dalam tekanan politik baik internal maupun eksternal (Putri, 2019).

Indonesia dijadikan “Poros Maritim Dunia” telah menjadi daftar dari Presiden Joko Widodo di tahun 2015. Serta melakukan pemberantasan *Illegal Fishing* dari perusahaan asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia. China

mengetahui hal ini, dan memanfaatkan untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam urusan maritim dengan memasok senjata militer hingga keperluan militer dalam rangka meningkatkan keamanan maritim di Indonesia (Amanda, 2021).

Hubungan antara China dan Indonesia telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah China juga mengatakan bahwa hubungan China dan Indonesia lancar dan membaik. Kerjasama antara Cina dan Indonesia telah dicapai dalam berbagai bidang. Program *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan salah satu kebijakan luar negeri pemerintah China untuk memperluas perekonomian ke berbagai belahan dunia. Jaringan transportasi diciptakan untuk menghubungkan Cina dengan negara-negara di berbagai belahan dunia melalui sarana transportasi Barat. Program ini terutama menargetkan negara-negara yang ada di dunia, sehingga kerjasama internasional di berbagai bidang menjadi mudah. China melakukan beberapa kerjasama ekonomi dengan negara-negara di dunia. Tentunya kerjasama ekonomi juga dipengaruhi oleh politik, dimana kerjasama menciptakan hubungan yang erat antar negara (Saragih, 2022).

Dunia tengah dihebohkan dengan kehadiran dari Covid-19. isu ini mulai menyebar ke seluruh negara sehingga menjadi fokus perhatian dari masyarakat dari tiap-tiap negara. Merebaknya informasi mengenai penyebaran dari Corona Virus atau dikenal dengan Covid-19 telah menyita perhatian banyak orang di dunia. Kemunculan kebijakan politik ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Tanggapan yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkait dengan Covid-19 ini mengeluarkan kebijakan

yang difungsikan menjaga keamanan bagi masyarakat di Indonesia. Kebijakan politik Presiden Joko Widodo lebih kepada kebijakan yang mengabungkan dua kekuatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah sebagai perantaha dari pemerintah pusat disertai dengan masyarakat yang menjadi subjek. (Hastangka, 2020).

SIMPULAN

Kerjasama bilateral merupakan suatu hubungan kerjasama yang dijalin oleh antara dua pihak atau negara yang terbatas oleh geografinya (wilayah) untuk mencapai suatu tujuan. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama bilateral yakni : karena adanya konflik dalam interaksi, oleh karena itu konflik inilah yang membentuk suatu hubungan yang serius, selain itu adanya rasa saling membutuhkan dari satu negara dengan negara yang lainnya membuat suatu negara perlu untuk menjalin hubungan bilateral . Tanpa adanya suatu hubungan dari kedua negara akan membuat salah satu negara ini tidak dapat bertahan. Hubungan bilateral yang dijalin oleh negara Indonesia dan China mencakup berbagai bidang baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Hubungan bilateral politik, ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dan China telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan peningkatan pertemuan antara kepala negara dan pemerintahan negara-negara tersebut.

Ketika masa kepemimpinan presiden Joko Widodo jaringan Indonesia-China berkembang cukup

pesat. Sebenarnya pertumbuhan tersebut bagian dari indikasi kuat kebijakan luar negeri Indonesia pada China. Prioritas presiden Jokowi terhadap China telah terlihat dari awal mandatnya. Secara simbol negara China merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh presiden Jokowi yakni pada 8 November 2014. Kunjungan yang dilakukan Jokowi bertepatan dengan dilaksankannya KTT APEC di Beijing China. Membaiknya jaringan Indonesia-tingkok tercermin dalam peringatan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-China. Kemudian presiden Jokowi melakukan kunjungan kembali pada tanggal 25-28 maret 2015 guna membahas beberapa isu dalam rangka memperkuat kerjasama China-Indonesia. Dalam pembahasan tersebut para kepala negara memfokuskan pada bidang ekonomi khususnya perniagaan, infrastruktur, industri, keuangan, pariwisata, dan sosial, dari pertemuan ini di sepakati 8 nota kesepahaman.

Adapun bentuk kerjasama bilateral Indonesia-China yakni: Kegiatan pemberian beasiswa kepada para pelajar, Indonesia dan China telah melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan. Kerjasama ini juga membahas mengenai standarisasi dalam penyelenggaraan ujian Bahasa mandarin (HSK) yang berada di Indonesia. Selain itu, kerja sama di bidang pendidikan beberapa kali diintensifkan selama musim 2016, misalnya dengan pembentukan Aliansi Think Tank Universitas Indonesia Tionghoa, yang diluncurkan oleh Universitas Kajian Luar Negeri Beijing dengan anggota Tionghoa, dengan beberapa universitas di Indonesia untuk melaksanakan kerjasama dan pertukaran informasi antara universitas kedua negara.

Organisasi ASEAN dan China merupakan pendekatan regional yang dilakukan oleh Indonesia dengan China. Terkait dengan mengenai konflik Laut China Selatan, Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan kebijakan hukum dan diplomasi. Melalui kedua cara tersebut, inti yang dimaksud bertujuan agar Indonesia ikut dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Laut China Selatan. Dengan diplomasi yang menjadi tujuan dalam memelihara kestabilan dari keamanan regional diikuti oleh China dan Negara di ASEAN untuk tidak bertindak yang akan menimbulkan ketegangan militer. Indonesia menerapkan kebijakan hukum dan diplomasi dalam pemecahan masalah Laut China Selatan dengan konteks berdasarkan Prinsip-Prinsip PBB.

Hubungan antara China dan Indonesia telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah China juga mengatakan bahwa hubungan China dan Indonesia lancar dan membaik. China dan Indonesia telah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. Program *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan salah satu kebijakan luar negeri pemerintah China untuk memperluas perekonomian ke berbagai belahan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2018). Kerja Sama Maritim Indonesia-China Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018, 6 (3).
- Amanda, R. (2021). Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral China-Indonesia. *Jurnal Pamator*, 14(1).
- Andika, M. T. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan *Indonesian Perspective*, 2(2).
- Ansori, F. (2017). Pusat Bahasa Mandarin Universitas Al Azhar Indonesia: Refleksi dan Proyeksi Hubungan Sosial Budaya China-Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(1).
- Candra, G. A. E, dkk. (2022). Perspektif Hukum Internasional Mengenai Kerja Sama Bilateral. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 269-276.
- Denimah. (2021). Peran Kerjasama Bilateral Australia– Indonesia Melalui Program Mampu (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan) Dalam Mendukung Tercapainya Sustainable Development Goals Di Indonesia Tahun 2017–2020. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Hastangka & Farid, M. (2020). Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganegaraan Dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus Covid-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.
- Huda, N. (2018). Perdagangan Bilateral Indonesia-China Periode 2000-2009. *Repository YARSI*.
- Kalebos, F. E., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2020). Kerjasama Indonesia-China (Suatu Studi Tentang Kebijakan Penerbangan Langsung Manado-China). *Jurnal Politico*, 9(1).

- Mulyadi, M. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15(1).
- Madu, L. (2014). Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014 – 2019. *Jurnal Transnasional*, 9(2).
- Poole, A. (2014) *The Foreign Policy Nexus; National Interests, Political Values, and Identity*. Australia: National Security College Issue Brief.
- Putri, S. Y, & Ma'arif, D. (2019). Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia dan China pada Implementasi Program Belt and Road Initiative. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(3).
- Rachmayanti, N. (2014). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (China) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013). Retrieved August, 19, 2016.
- Rosyidin, M. (2017). Foreign Policy In Changing Global Politics: Indonesia's Foreign Policy And The Quest For Major Power Status In The Asian Century. *South East Asia Research*, 25(2).
- Saputra, F. A. (2016). Dampak Program Pemberantasan Iuu Fishing Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia – China. *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2016, 4 (4).
- Saragih, H. M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 8(1).
- Saragih, H. M. dkk. (2022). Kekuatan Ekonomi-Politik China Pasca Covid-19. *Jurnal Dauliyah*, 7(1).
- Sari, N. L. A. & Suwanda, I.W. (2019). Kebijakan Di Era Pemerintahan Joko Widodo Dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum Dan Agraria). *Jurnal Ganec Swara*, 13(2).
- Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan Dan Kerjasama. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(2).
- Simanjutak, C. U. & Rachman, M. F. A. (2020). Kerja Sama Bilateral Cina-Rusia dalam Sektor Gas Alam Tahun 2014 untuk Meningkatkan Keamanan Energi Cina. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16 (1).
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1).
- Sudjatmiko, T. (2012). Analisa Hubungan China-Indonesia Terkait Keantariksaan. *Jurnal Berita Dirgantara*, 13(4).
- Tobing, S. E. L., & Prasetya, M. N. (2021). Kerjasama Indonesia-China Melalui Program (KRPL) Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Era SBY. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 2(1),
- Umar, H. & Naya, C.G. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Hegemoni China Di Kawasan Laut China Selatan Pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016 – 2019. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 141(71).
- Zein, Abdul Baqir. (2000). *Etnis China Dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Insan.